



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AINUR ROJIK
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 488345

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 972.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m<sup>2</sup>/77 m<sup>2</sup> di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 220 m<sup>2</sup> di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
3. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 1925 m<sup>2</sup> di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 3730 m<sup>2</sup> di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 120 m<sup>2</sup> di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 230 m<sup>2</sup> di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 245.700.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.700.000



5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
190.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	7.750.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	99.744.880
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.325.194.880
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.325.194.880

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.